salam tribun

Sukacita Idulfitri

UMAT Islam di seluruh dunia menyambut dengan sukacita hari raya Idulfitri, 1 Syawal 1441 H. Kegembiraan karena umat selesai menunaikan kewajiban puasa sebulan. Idulfitri berarti kembali pada naluri kemanusiaan yang murni. Dengan menjalankan puasa secara benar, terdapat jaminan dibersihkan dari dosa vertikal. Dengan silaturahim saling memaafkan, sesama muslim akan terbebas dari dosa horizontal. Idulfitri juga bermakna kembali kepada kesucian dan terbebas dari dosa. Keberhasilan menjalankan ibadah puasa tampak pula pada kualitas kesalehan individu dan sosial yang meningkat.

Ketika itu, jiwa makin dipenuhi hawa kelmanan, hati sanggup berempati, serta peka atas penderitaan dan musibah saudaranya di ujung sana. Pengendalian diri pun meresap ke dalam jiwa. Kemampuan pengendalian diri yang dibina selama puasa, terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Sikap lain yang harus tetap dihidupkan adalah sabar, ulet, tahan uji, dan tidak mudah putus asa. Begitu pula, lapang jiwa, luas pandangan, dan selalu berprasangka baik. Selamat Idul Fitri. (*)

kilas tokyo

Kyufukin dan Semangat Berdonasi

MINGGU ini, sebuah amplop putih dari Pemerintah Kota Tokyo tiba di rumah saya. Isinya tentang aplikasi Kyufukin, tunjangan khusus Covid-19 Jepang senilai 100.000 yen; sekitar 13,5 juta per warga. Jumlah ini kira-kira bisa mencover biaya hidup sebulan seorang mahasiswa asing. Warga diminta mengecek kebenaran list jumlah anggota keluarga plus permintaan nomor rekening. Setelah itu tinggal menunggu hingga tunjangan masuk. Uniknya, ada kolom pilihan mau terima atau tidak. Ada yang tidak berniat menerima? Mungkin ada juga, entahlah. Tapi bukan sekali ini Jepang membagi uang ke warga. Ketika krisis Lehman Shock tahun 2009, kami pernah kebagian 12.000 yen per orang.

Muh Zulkifli Mochtar
Doktor alumni Jepang asal Makassar. Bermukim di Tokyo

Jepang memang agresif mengeluarkan stimulus budget untuk penanggulangan Covid-19 ini, sekitar 117 triliun yen atau hampir 16.000 triliun rupiah. Menurut kalkulasi Columbia Economics Professor Ceyhun Elgin di BBC News, budget Covid-19 Jepang mencapai 20 persen dari total GDP-nya. Ini nomor dua terbesar di dunia setelah negara Malta. Dua hari lalu, PM Shinzo Abe kembali mencabut status darurat di Osaka, Kyoto dan Hyogo. Tokyo belum dicabut, masih menunggu review akhir bulan ini. Berarti sudah 42 dari 47 prefektur status darurat dicabut, aktifitas ekonomi boleh bergeliat lagi.

Belanja masyarakat juga diharap bergairah lagi. Bisnis kecil dan usaha freelance yang terlanjur terkena dampak, bisa memohon tunjangan khusus hingga 1 juta yen. Menurut data NHK, pertengahan Mei sudah ada 90 ribu aplikasi masuk ke pemerintah. Amerika menyiapkan stimulus Covid-19 hingga 14 persen, juga membagi warganya 1200 USD. Tetangga kita Singapura menyiapkan paket 13 persen dari GDP nya, dan memberi warga 422 USD. Australia siapkan budget 11%, dan Kanada sekitar 8,4 persen dari GDP.

Menurut Menteri keuangan Sri Mulyani, Indonesia mengalokasikan stimulus 405 triliun, sekitar 2,5 persen dari PDB. Meski tidak sefantastik negara lain, tetap ada dana BLT dan bansos sembako ke warga yang masuk kategori.

Tapi marilah melupakan angka angka menggiurkan tunjangan negara lain. Toh, setiap negara punya belanja ekonomi dan standar hidup beda. Malah saya sangat surprised ketika menemukan sebuah hasil survey bahwa Indonesia dianggap negara paling dermawan di dunia oleh Charities Aid Foundation (CAF) melalui survey World Giving Index tahun 2018. Survei berdasar tiga parameter: menolong orang yang membutuhkan, mendonasikan uang, dan kesediaan untuk voluntary. Di CAF tahun 2019 dengan spesial edisi "Ten years of giving trends", agregat indeks Indonesia juga masuk 10 besar. Untuk memastikan, saya coba browing data survei lain. Survey Legatum Prosperity Index 2019 ternyata juga menempatkan Indonesia di urutan kelima dari 167 negara untuk bidang kategori Social Capital; berupa hubungan sosial, nilai-nilai sosial, dan partisipasi masyarakat. Tidaklah salah mengatakan Indonesia adalah negara berkembang, tapi spirit kedermawanan dan kerjasama sosialnya sudah sangat maju.

Pantas saja grup whatsapp Indonesia saya setiap hari masih ramai dengan aktifitas sosial dan pengumpulan sumbangan. Donasi mengalir deras dari orang mampu ke yang membutuhkan. Walau masa PSBB dan bukber bersama dilarang, bagi-bagi takjil di jalan dan panti asuhan marak lancar seperti biasa. Negara ini dipenuhi oleh orang orang yang gemar mengejar kebaikan, sumbangsih dan kerja sama sosial. Masyarakat Indonesia punya power tersendiri lain menghadapi Covid-19 ini. (*)

Ke Mal, Sekolah, dan Kerja Lagi: Siapa Takut?

Oleh:
Amran Razak

Guru Besar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM-UNHAS)

Simak Juga di
www.tribun-timur.com
ada komentar soal opini ini, kirim ke facebook tribun-timur berita online makassar

Waspadalah terhadap limpahan infeksi yang dinamis. Tingkatkan kesabaran selama penguraian dan jangan membayar pemulihan yang lebih cepat dengan mortalitas yang lebih tinggi. Nilai kekebalan kelompok sangat tergantung pada kemampuan pemerintah mengelola ketersediaan obat dan vaksin secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

PENANTIAN yang tak kunjung datang melandainya kurva covid-19 bisa mengiris harapan keberlanjutan aktivitas kemanusiaan kita. Kegusaran ini harus dijawab dengan menciptakan keseimbangan mengendalikan pandemi Covid-19 dan ketahanan ekonomi nasional.

Kebijakan kesehatan dan tujuan kebijakan ekonomi dalam pengendalian pandemi mestinya seiring – tidak mutual exclusive. Strategi epidemiologis yang diadopsi banyak negara - yang secara tepat digambarkan sebagai 'palu dan tarian' (Pueyo, 2020) - juga didasarkan pada prinsip ekonomi yang sehat.

Dengan memperhatikan respons perilaku dan eksternalitas, sebagaimana tawaran Assenza et. al. (2020) untuk kebijakan pengunclan dan pemulihan.

Beredarnya Surat Kementerian Bagian Usaha Milik Negara (BUMN) perihal Antisipasi Skenario The New Normal BUMN, 15 Mei 2020, memperjelas sikap pemerintah telah memasuki pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menggeliatkan kembali aktivitas ekonomi nasional.

Dalam tahapan pemulihan kegiatan ekonomi BUMN melalui 5 phase dimulai 25 Mei sampai dengan 20 Juli 2020. Phase 1 (25 Mei) : Membuka sektor industri & jasa kesehatan. Phase 2 (1 Juni) : Pembukaan Mall & toko retail, restoran retail dan dalam hotel. Phase 3 (8 Juni) : pembukaan tempat pendidikan (University & Training Center). Phase 4 (29 Juni) : pembukaan kegiatan ekonomi untuk seluruh sektor, dan pembukaan bertahap restoran, café, fasilitas kesehatan. Pembukaan tempat ibadah termasuk perjalanan dinas sesuai prioritas & urgensi, dan kegiatan outdoor. Phase 5 (13 & 20 Juli) : pembukaan tempat atau kegiatan ekonomi lainnya menuju skala normal.

Awal Agustus operasi seluruh sektor secara normal dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan dan kebersihan yang ketat. #CovidSafe BUMN

Teori Palu

Kelihatannya pemerintah Indonesia mengikuti strategi dua fase untuk menangani pandemi, sebagaimana banyak dipakai negara lainnya. Awalnya mereka merespons dengan tahap konfirmasi yang kuat yang sementara waktu membatasi kegiatan ekonomi untuk mengendalikan pandemi Covid-19 – 'palu'.

Pemerintah Indonesia menyodorkan paket stimulus ekonomi berupa program pemulihan ekonomi (restrukturisasi kredit, penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya UMKM), insentif perpajakan dan stimulus KUR, dan perlindungan sosial (program keluarga harapan, kartu prakerja, insentif cicilan KPR, diskon tarif listrik bersubsidi).

Dilawali, skenario antisipasi The New Normal BUMN, dengan protokol ketat menekan penyebaran Covid-19 – 'tarian'. Dalam konteks ini, kebijakan sektoral yang optimal harus menargetkan besaran absolut dari limpahan risiko infeksi dari interaksi tatap muka dan paparan ekonomi dari perubahan mendadak dalam pola pengeluaran, kekurangan permintaan, atau gangguan rantai pasokan.

Pertama, membatasi kegiatan yang menghasilkan eksternalitas risiko infeksi yang kuat tetapi eksternalitas ekonomi yang lemah (mis. restoran, bioskop).

Kedua, melindungi atau mensubsidi kegiatan ekonomi penting yang memiliki dampak ekonomi positif yang kuat, terutama jika mereka menggunakan eksternalitas risiko infeksi yang lemah (mis. perbankan, farmasi).

Ketiga, berhati-hati mengelola kegiatan yang penting secara ekonomi dan memiliki limpahan risiko infeksi yang tinggi (mis. layanan kesehatan, pendidikan). Sektor-sektor ini memiliki dampak paling kuat terhadap kesejahteraan.

Keempat, mengelola eksternalitas statis adalah kunci untuk meminimalkan biaya ekonomi: jangan membuat pandemi lebih mahal daripada yang seharusnya!

Waspadalah terhadap limpahan infeksi yang dinamis. Tingkatkan kesabaran selama penguraian dan jangan membayar pemulihan yang lebih cepat dengan mortalitas yang lebih tinggi. Nilai kekebalan kelompok sangat tergantung pada kemampuan pemerintah mengelola ketersediaan obat dan vaksin secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

Dalam banyak hal, anjuran kebijakan ini tidak berbeda jauh dari yang disarankan oleh para ahli epidemiologi. Sebabnya, dinamika kebijakan optimal tergantung pada dinamika epidemi.

Namun demikian, prinsip-prinsip dasar ilmu ekonomi sangat terkait dengan harga bayangan risiko infeksi, 'simalakama' antara kematian dan kemakmuran ekonomi, imunisasi yang dinamis dan penyebaran infeksi. Asal jangan beralas kata, pokoknya *eja tompi na doang*.!!!

Kewajiban Zakat Perusahaan

Oleh:
Dr M Wahyuddin Abdullah SE MSi Ak CA

Dosen UIN Alauddin Makassar

Simak Juga di
www.tribun-timur.com
ada komentar soal opini ini, kirim ke facebook tribun-timur berita online makassar

Imam Malik dan Imam Nawawi berpendapat kewajiban zakat perusahaan adalah sejenis biaya, ditempatkan sebagai biaya sosial (zakat terletak pada pemikiran harta). Zakat dianggap pembagian laba atau zakat dihitung setelah pembagian laba kepada pemilik (pemegang saham memiliki nisab).

HARTA perusahaan merupakan transfer kepemilikan dari para pemodal ke satuan usaha. Diakui sebagai harta perusahaan dan memenuhi syarat zakat mal, namun berpotensi tidak terjamah zakat, karena tidak dijelaskan khusus dalam fikih muamalat. Entity business theory menjelaskan perusahaan sebagai kesatuan usaha yang terpisah dari pemiliknya dan beroperasi atas namanya sendiri.

Teori ini memberikan batasan keterpisahan harta kepemilikan pribadi dengan kepemilikan perusahaan. Harta atau ekuitas yang telah disertorkan ke perusahaan akan pindah tangan pengelolaannya kepada agen, atau biasa disebut manajer perusahaan.

Keterpisahan kepemilikan bertujuan menghindari pencampuran harta pribadi dengan harta yang sudah diklaim perusahaan. Bilamana ada pencampuran harta di antara keduanya, maka akan menyulitkan tata kelola perusahaan, khususnya menakar tanggung jawab perusahaan kepada pemilik dan distribusi keuntungan (dividen) kepada para pemilik.

Kepemilikan perusahaan tidak hanya terbatas pada satu atau dua orang saja, bahkan ada kepemilikan institusi. Perusahaan memiliki atau dimiliki oleh perusahaan lain, seperti halnya kombinasi bisnis, ada induk perusahaan dan anak perusahaan.

Kepemilikan yang dimaksud tersebut ditandai dengan kepemilikan modal, atau seberapa besar aset perusahaan dimiliki pihak-pihak berkepentingan. Islam mengakui pemilikan harta, bahkan mendorong manusia memiliki harta sebanyak-banyaknya dengan cara halal dan legal.

Pemilikan harta tidak bersifat mutlak, manusia tidak bebas menggunakan harta, karena pemilik mutlak harta dan seluruh alam adalah Allah swt. Transfer harta dari personal pemodal ke perusahaan bukan berarti pelepasan semata, namun bertujuan memberikan return ataupun capital gains untuk kesejahteraan pemilik.

Penanaman harta ke dalam perusahaan bertujuan untuk pengembangan dan menjadikan aset produktif, tidak lagi tertimbun memperkaya orang-orang tertentu (kemaslahatan). Harta yang dikelola perusahaan digunakan untuk kebutuhan investasi dan operasional perusahaan.

Melalui skill manajer profesional, harta berkontribusi membentuk perusahaan yang sustainabel dan kemakmuran pemiliknya. Harta atau istilah akuntansinya adalah aset merupakan sumber daya yang dikuasai dan memberikan manfaat ekonomis.

Harta (mal) yang wajib dizakati harus memenuhi syarat yaitu dimiliki dan berkembang.

Haul dan nisab menjadi takarannya. Harta perusahaan wajib zakat bukanlah totalitas aset, karena perusahaan memiliki komponen keseimbangan lainnya, yaitu utang, ekuitas, dan laba.

Semua harta yang dimiliki diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya (QS at-Taubah: 103 dan QS al-Baqarah 267). Perusahaan tidak hanya menggunakan harta yang sifatnya lancar dalam menunjang operasionalnya, tetapi juga harta tidak tetap lainnya, bahkan menggunakan utang membiayai aktivitasnya.

Perusahaan juga memperoleh keuntungan rutin dan periodik atas operasionalnya. Dengan demikian, harta perusahaan yang wajib dizakati memerlukan penghitungan rasional dan pijakan penzakatan.

Imam Malik dan Imam Nawawi berpendapat kewajiban zakat perusahaan adalah sejenis biaya, ditempatkan sebagai biaya sosial (zakat terletak pada pemikiran harta). Zakat dianggap pembagian laba atau zakat dihitung setelah pembagian laba kepada pemilik (pemegang saham memiliki nisab).

Penghitungan zakat berdasarkan aset perusahaan terformulasikan dalam 3 metode yaitu, 1) zakat berdasarkan aset yang digunakan memperoleh laba, 2) zakat berdasarkan pertumbuhan modal bersih, dan 3) zakat berdasarkan aset bersih perusahaan.

Landasan hukum zakat perusahaan adalah nash-nash bersifat umum, karena tidak dijelaskan khusus dalam fikih muamalat.

Tidak seperti zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat hasil bumi, dan zakat perniagaan.

Para ulama peserta Muktamar Internasional Zakat yang pertama di Kuwait, 29 Rajab 1404 H menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perniagaan. Karena aspek ekonomi dan legal untuk kegiatan perusahaan berpijak pada trading.

Pembayaran zakat perusahaan dianggap sama dengan zakat perdagangan, termasuk nisab setara 85 gram emas dan besaran zakat 2,5% untuk 1 tahun Qamariah, dan 2,575% untuk 1 tahun Masehi (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution).

Harta yang dimaksud adalah kepemilikan penuh, melebihi kebutuhan pokok, dan bebas utang.

Namun, ketika muzakki adalah entitas bisnis, maka metode penghitungan zakat beragam, sesuai tujuan pada angka pembayaran zakat optimal.

Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit) untuk kepentingan para pemodal saja, tetapi juga berorientasi kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan secara langsung (indirect participant). Orientasi pada indirect participant ini akan menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan kepada manusia (penerima zakat).

Aset bersih ataupun laba dialokasikan sebagai zakat perusahaan. Orientasi zakat ini mendekatkan perusahaan pada kesadaran ketuhanan dan pertanggungjawaban horizontal kepada manusia dan alam. Sejak Muktamar Zakat di Kuwait tersebut, perusahaan diharuskan menunaikan zakatnya.

Syarat perusahaan adalah kepemilikan dikuasai orang muslim, bidang usaha halal, aset perusahaan dapat dinilai, aset perusahaan berkembang, dan minimal aset mencapai nisab.

Ahli fikih menetapkan, kalau ada seseorang mati sedang ia belum menunaikan zakat, maka zakat itu menjadi utang yang menempel pada hartanya. Zakat perusahaan adalah ekspresi rasa syukur dan tanggungjawab kepada Allah swt.(*)

Tribun Timur
SPIRIT BARU MAKASSAR
● **PEMIMPIN UMUM:** ANDI SURUJI ● **WAKIL PEMIMPIN UMUM:** AGUS NUGROHO ● **PEMIMPIN REDAKSI:** DAHLAN DAHI ● **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI I:** RONALD NGANTUNG ● **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI II:** THAMZIL THAHIR ● **MANAJER PRODUKSI:** AS KAMBIE ● **MANAJER NEWS:** JUMADI MAPPANGANRO ● **MANAJER DIGITAL:** MANSUR AMIRULLAH ● **STAF REDAKSI:** HERMAN DARMO, ANDI SURUJI, AGUS NUGROHO, DAHLAN DAHI, RONALD NGANTUNG, THAMZIL THAHIR, AS KAMBIE, ALIM BACHRI, INA MAHARANI SRI ISTIANINGTYAS, JUMADI MAPPANGANRO, MUH IRHAM, ARIF FUDDIN USMAN, AQSA RIANDY PANANRANG, RIDWAN PUTRA, IMAM WAHYUDI HASRIANI LATIF, SURYANA ANAS, EDI SUMARDI, ILHAM MULYAWAN, WA ODE NURMIN, RASNI GANI, ILHAM ARSYAM, ANITA KUSUMA WARDANA, MAHYUDDIN MALIK ● **REPORTER:** ABDUL AZIS ALIMUDDIN, HASAN BASRI, RISALDY IRAWAN, MUHAMMAD HASIM ARFAH, HASRUL, SAKINAH SUDIN, MUNAWWARAH AHMAD, SUKMAWATI IBRAHIM, M FADHLY ALI, SUDIRMAN, SYAMSUL BAHRI, ANSAR LEMPE ● **FOTOGRAFER:** MUHAMMAD ABDIWAN, SANOVRA JR ● **PEMIMPIN PERUSAHAAN:** CIPTYANTORO ● **WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN:** YUNITRA ● **MANAJER IKLAN/PROMOSI:** DEDY PAKIDING ● **MANAJER SIRKULASI:** ABD HARIS SUARDI ● **MANAJER CETAK:** MUZAKKIR ● **PENERBIT:** PT BOSOWA MEDIA GRAFIKA ● **KOMISARIS UTAMA:** SADIKIN AKSA ● **KOMISARIS:** HERMAN DARMO, DANANG PRAMONO ● **DIREKTUR UTAMA:** DAHLAN DAHI ● **DIREKTUR:** ANDI SURUJI, CIPTYANTORO ● **KANTOR REDAKSI, IKLAN DAN SIRKULASI:** MAKASSAR: JL CENDERAWASIH NO. 430 MAKASSAR 90134, **TELEPON:** 0411-811-5555 (HUNTING), **FAX REDAKSI:** 0411-811-5522, **FAX BISNIS:** (0411) 811-5511 ● **e-mail:** redaksitribuntimur@gmail.com ● **BIRO:** FEBBY MAHENDRA PUTRA (KEPALA BIRO JAKARTA) ● **JAKARTA:** ● **REDAKSI:** JL PALMERAH SELATAN NO 12 JAKARTA 10270 **TELEPON:** 021-5483008, 5480888, 5490666, **FAX:** 021-5495358 ● **IKLAN:** GEDUNG PERSDA LT-1 JL PALMERAH SELATAN NO 3 JAKARTA 10270, **TELEPON** 021-5483008, 54080888, 5490666 EXT 7634-7646, **FAX** 021-53696583 ● **e-mail:** iklan@persda.co.id ● **TARIF IKLAN:** Display (Full Colour) = Rp 85.000/mmk display (BW) = Rp 75.000/mmk, Advertorial (Full Colour) = Rp 35.000/mmk, Advertorial (BW) = Rp 25.000/mmk, Iklan Dukacita Instansi (BW) = Rp 25.000/mmk, Iklan Dukacita Perorangan (BW) = Rp 10.000/mmk, Iklan Kolom (FC) = Rp 5.000/mmk, Iklan Kolom (BW) = Rp 2.500/mmk, 1 Kolom x (min 50 mm/max 80 mm), Iklan Baris = Rp 5.000/baris (min 3 baris/max 10 BARIS) ● **HARGA LANGGANAN:** Rp 80.000/BULAN ● **REKENING:** PT BOSOWA MEDIA GRAFIKA (TRIBUN TIMUR), BRI 00.500.1000.902.300 ● **PERCETAKAN:** PT BOSOWA MEDIA GRAFIKA. Setiap artikel/tulisan/foto atau apapun yang telah dimuat di harian Tribun Timur dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari Tribun Timur

WARTAWAN TRIBUN TIMUR SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER